

Perkembangan Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Aceh

MUIS

Staff Pengajar STISIP Al Washliyah Banda Aceh

Email: muismusel@yahoo.com

Abstract: *The tourism sector is one sector that is able to increase employment and economic growth. Currently, halal tourism (halal tourism) is starting to be in great demand. This is in line with the increase in Muslim tourists from year to year. The development of halal tourism has begun to be carried out by various countries, both Muslim and non-Muslim majority countries. One of the things that come to mind when people call Aceh is the application of Islamic Shari'a in every aspect of life, including the aspect of tourism. Halal tourism is an ongoing effort by the Acehnese Government to realize the Aceh brand as a halal symbol. The fact is that Aceh won three categories in the 2016 National Halal Tourism Competition held by the ministry of Tourism of Republic of Indonesia. Aceh's tourism potential is very promising both in terms of diversity and unique culture, culinary peculiarities, coffee flavors, atmosphere in the coffee shop, Islamic culture and its natural and beautiful natural charm. Efforts to branding Aceh as halal tourism are challenges that are not easy to implement. The halal label in Aceh is actually not a terminology that needs to be debated again. This article will explore the development of halal tourism in Aceh, review the concepts and principles of halal tourism, and discuss opportunities and challenges.*

Keywords: *Halal tourism, Muslim tourist, chance, challenge*

Pendahuluan

Pengetahuan dan kesadaran akan produk halal menjadikan pertumbuhan industri halal semakin meningkat. Meningkatnya industri halal tersebut, memunculkan wisata halal (halal tourism) sebagai fenomena baru. Hal ini juga didukung oleh berbagai literatur yang menjelaskan bahwa wisatawan muslim peduli terhadap konsumsi produk dan layanan sesuai syariah ketika berkunjung ke tempat wisata. Minat terhadap wisata halal (halal tourism) mengalami pertumbuhan yang meningkat. Peningkatan tersebut seiring dengan meningkatnya wisatawan muslim dari tahun ke tahun. Untuk mengeksplorasi potensi besar pariwisata halal tersebut, banyak negara (baik negara dengan mayoritas muslim maupun non-muslim) mulai menyediakan produk, fasilitas, dan infrastruktur pariwisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim. Namun, masih banyak para pelaku bisnis dan pihak yang terlibat di sektor pariwisata terkendala dalam pemahaman (baik produk, fasilitas maupun infrastruktur) dari wisata halal tersebut. Sektor pariwisata memainkan peranan penting dalam ekonomi dunia karena dianggap sebagai salah satu kontributor pertumbuhan lapangan kerja dan pertumbuhan

ekonomi di negara manapun maupun di daerah Aceh sendiri. Sehingga pariwisata dapat pula dipandang sebagai salah satu sumber paling penting bagi Produk Domestik Bruto (PDB). Adanya peningkatan wisatawan Halal Aceh merupakan peluang dan tantangan untuk meningkatkan sektor pariwisata. Berdasarkan hal itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, konsep, peluang dan tantangan wisata halal Aceh (halal tourism).

Kata halal berasal dari bahas Arab halla, yahillu, hillan, wahalalan yang memiliki makna dibenarkan atau dibolehkan oleh hukum syarak. Memiliki arti sebagai sesuatu yang dibolehkan atau diizinkan oleh Allah. Kata tersebut merupakan sumber utama yang tidak hanya terkait dengan makanan atau produk makanan, tetapi juga memasuki semua aspek kehidupan, seperti perbankan dan keuangan, kosmetik, pekerjaan, pariwisata, dan lainnya. Sementara itu, pariwisata halal adalah salah satu konsep yang muncul terkait dengan halal dan telah didefinisikan dalam berbagai cara oleh banyak ahli. Sebagian yang mendefinisikan wisata halal (halal tourism). Berdasarkan definisi tersebut, dasar-dasar pariwisata halal termasuk komponen-komponen seperti: makanan halal, transportasi halal, hotel halal, logistik halal, keuangan islami, paket perjalanan islami, dan spa halal.

Syariat Islam merupakan salah satu kekhasan yang sangat melekat ketika setiap saat orang membahas tentang Aceh. Implementasi Syariat Islam berusaha diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan di Aceh. Hampir setiap isu terkait dengan penerapan Syariat Islam di Aceh menarik dari sisi pemberitaan baik skala lokal, nasional hingga internasional. Demikian juga halnya ketika muncul gagasan untuk menciptakan wisata halal di Aceh dengan penekanan nuansa Syariat Islam yang kental. Potensi pariwisata Aceh sangatlah menjanjikan terutama unsur budayanya yang unik, pesona alamnya yang sangat indah dan natural dan kuliner terutama cita rasa kopinya yang sudah mendunia. Namun disisi lain, menurut penulis, Aceh belumlah menjadi destinasi wisata yang mampu menyedot pengunjung baik dalam negeri dan luar negeri untuk datang secara khusus dengan tujuan berwisata (tourism and leisure purpose). Faktanya, memang benar bahwa lalu lintas dan pergerakan jumlah orang yang datang ke Aceh tergolong tinggi, hal tersebut bisa terlihat dari padatnya jalur penerbangan ke Aceh. Data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Aceh menunjukkan tren yang sangat positif dalam kurun waktu 5 tahun mengacu kepada data dari tahun 2012 hingga 2016,

Dari sisi industri pariwisata secara konvensional saja Aceh masih membutuhkan perhatian, upaya dan komitmen ekstra dari semua pemangku kepentingan agar dapat

mengkonversikan potensi wisata yang ada di Aceh menjadi ekonomi yang bergerak dinamis dan berwujud sebagai sumber penghidupan bagi pelaku usaha wisata dan roda perekonomian masyarakatnya. Dengan demikian, menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana potensi, prospek dan kesiapan provinsi Aceh dalam mengimplementasikan gagasan wisata halal (dimana secara teknis gagasan dan konsep wisata halal menawarkan sesuatu yang lebih spesifik dibandingkan dengan pariwisata konvensional)? Apa saja tantangan yang akan dihadapi dalam pelaksanaannya? Provinsi Aceh secara de facto dan de jure merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang mendapat pengakuan secara legal dari negara untuk menerapkan Syariat Islam. Hal tersebut tentu memberi peluang bagi Pemerintah Aceh untuk mengimplementasikan nilai-nilai ke-Islaman dalam berbagai sektor, termasuk dalam sektor pariwisata. Tidakkah kemudian seharusnya hal tersebut menjadi modal besar bagi Aceh untuk menjanjikan wisata halal dengan nuansa Islami yang begitu kental dan membumi? Bukankah gaya hidup halal pun sekarang sedang menjadi tren dunia? Faktanya busana Islami pun menjadi penggerak ekonomi yang besar dalam industri fashion. Semestinya cita-cita Aceh untuk menjadikan provinsi Serambi Mekkah ini sebagai destinasi wisata halal bukanlah sebuah utopia karena tren global pun sedang bergerak kesana yaitu penyediaan wisata alternatif yaitu wisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam secara pasar global.

Berdasarkan prinsip dan atau syarat utama wisata halal diatas, beberapa prinsip dapat berseberangan dengan kepentingan lainnya khususnya pada negara-negara non-Islam yang mengembangkan wisata halal. Sehingga diperlukan diskusi dan kajian mengenai hal tersebut, oleh para peneliti, praktisi, termasuk ulama yang paham akan hal ini. Namun, dari prinsip-prinsip atau syarat utama wisata halal diatas, makanan halal, produk yang tidak mengandung babi, tidak ada minuman keras, ketersediaan fasilitas ruang ibadah, tersedianya Al-Qur'an dan peralatan ibadah (shalat) dikamar, petunjuk kiblat, dan pakaian staf yang sopan merupakan hal yang penting bagi wisatawan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Islam. Menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, warga muslim di Indonesia sebanyak 87,18%, sedangkan lainnya beragama Kristen (6,96%), Katolik (2,91%), Hindu (1,69), Budha (0,72) dan sisanya menganut agama yang lain (BPS, 2010). Potensi ini dimanfaatkan Indonesia untuk terus berupaya mengembangkan wisata halal (halal tourism). Hal ini didukung oleh kondisi geografis yang sangat strategis. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia menjadikan negara ini memiliki berbagai kekayaan flora dan fauna. Biodiversitas yang tinggi

ini menjadikan Indonesia memiliki potensi yang besar sebagai negara tujuan wisata. Produk wisata yang ditawarkan dikelompokkan dalam tiga hal yaitu wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan. Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (halal tourism), Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada tahun 2013, terdapat 37 hotel syariah yang telah bersertifikat halal dan 150 hotel menuju operasional syariah. Terdapat sebanyak 2.916 restoran dan 303 diantaranya telah bersertifikasi halal, dan 1.800 sedang mempersiapkan untuk sertifikasi (Kementrian Pariwisata, 2015). Pada umumnya, makanan dan minuman di Indonesia dilakukan sertifikasi halal oleh MUI yang ditandai dengan logo halal resmi pada kemasan makanan dan minuman, dan dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sehingga makanan dan minuman yang tersedia di Indonesia terjamin kehalalannya bagi wisatawan muslim. Sedangkan wisatawan non-muslim dapat meyakini bahwa makanan dan minuman tersebut tidak mengandung zat berbahaya bagi tubuh, sehingga layak untuk dikonsumsi. Indonesia melakukan sinergi dengan banyak pihak untuk mengembangkan wisata halal (halal tourism), contohnya Kementrian Pariwisata yang melakukan kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional (DSN), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Sertifikasi Usaha (LSU). Wujud konkret kerjasama tersebut yaitu dengan cara mengembangkan pariwisata serta mengedepankan budaya serta nilai-nilai agama yang kemudian akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu juga dilakukan pelatihan sumber daya manusia, sosialisasi, dan capacity building. Pemerintah juga bekerja sama dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) untuk menyediakan penginapan halal dan tempat makan yang bisa menyajikan menu makanan halal, dan bekerjasama sama juga dengan *Association of the Indonesia Tours and Travel* (ASITA) untuk membuat paket wisata halal ke tempat wisata religi. Walaupun wisata halal (halal tourism) tidak hanya terbatas pada wisata religi saja (Kementrian Pariwisata, 2015). Kementrian Pariwisata (2015) dalam laporannya mencatat bahwa terdapat 13 provinsi yang siap untuk menjadi destinasi wisata halal (halal tourism) yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali. Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi yang telah mengembangkan wisata halal untuk wisatawan muslim manca negara

dengan cukup baik. Aceh yang dijuluki sebagai serambi mekah memiliki budaya islam yang cukup kental dan kuat dibandingkan daerah lain. Hal ini dilihat dari penerapan sistem berbasis syariah yang sudah menjadi bagian dari gaya hidup (lifestyle) masyarakatnya sehari-hari. Kementerian Pariwisata menargetkannya sebagai destinasi wisata halal (halal tourism) yang digunakan untuk menarik wisatawan muslim dunia. Tolak ukur baik tidaknya penerapan wisata halal (halal tourism) di Aceh setidaknya dapat dilihat dari pencapaian dalam segi pariwisata. Aceh meraih tiga kategori dalam kompetisi pariwisata halal nasional tahun 2016 yaitu “Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim terbaik”, “Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik”, dan “Masjid Raya Baiturrahman sebagai daya tarik wisata terbaik”. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan BPS pada tahun 2017, sektor pariwisata Aceh bernilai sekitar Rp10,87 Triliun atau setara dengan 8,97% dari total perekonomian Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pariwisata di Aceh memiliki peran yang sangat penting. Selain Aceh, praktik wisata halal (halal tourism) juga mulai diterapkan di pariwisata Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada tahun 2016, Pemerintah Daerah Provinsi NTB bekerjasama dengan MUI dan LPPOM serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan UMKM melakukan sertifikasi halal pada restoran hotel, restoran non hotel, rumah makan dan UMKM. Tercatat terdapat 644 sertifikat halal yang sudah diterbitkan. Selain makanan halal, ketersediaan fasilitas ibadah juga sangat mudah ditemukan di NTB. Sebagai daerah dengan populasi muslim mencapai 90%, terdapat 4.500 masjid yang tersebar pada 598 desa dan kelurahan. Sehingga NTB juga dijuluki sebagai pulau seribu masjid. Indonesia berusaha mempromosikan halal tourism yang dimilikinya ke dunia internasional. Hal ini dilakukan dengan mengikuti World Halal Tourism yang dilaksanakan di Abu Dhabi pada tahun 2016.

Indonesia berhasil meraih 12 penghargaan dari total 16 kategori. Indonesia sudah didukung oleh berbagai komponen yang dapat mengantarkan kepariwisataan Indonesia menembus pasar global, khususnya pariwisata halal. Namun, perlu upaya untuk mengembangkan wisata halal di Indonesia, karena masih maraknya perjudian, tempat prostitusi, diskotik, penjualan bebas minuman keras, dan kegiatan yang diluar syariat sehingga perlu menjadi perhatian khusus.

Wisata halal pada dasarnya adalah menawarkan dan menjanjikan segala sesuatu yang mencerminkan nilai-nilai keIslaman, mulai dari hal yang paling kecil sekalipun sampai kepada ketersediaan layanan dan fasilitas yang ramah muslim. Terminologi wisata halal dalam literatur pada umumnya merujuk kepada banyak istilah antara lain Islamic tourism,

syari'ah tourism, halal travel, halal friendly tourism destination, Muslimfriendly travel destinations, dan halal lifestyle. Keseluruhan istilah tersebut jika kita tarik benang merahnya mengacu kepada satu hal yaitu berlakunya prinsip-prinsip Islam secara umum dalam semua aspek yang ditawarkan dalam paket wisata halal tersebut. Halal merupakan pencapaian yang memberikan keyakinan penuh bahwa pertama ia bermakna “boleh”, artinya segala sesuatu tidak terlarang untuk dilakukan atau dinikmati, kedua, ia bermakna ketenangan yaitu tanpa adanya keraguan terhadap hal yang ingin dinikmati tersebut. Oleh karena itu, ketika berbicara wisata halal, berikut adalah beberapa indikator wisata religi dalam Islam sebagaimana dikutip dari adalah:

- 1) Konsep budaya dalam kaitannya dengan pariwisata Islam (situs budayaagama Islam).
- 2) Pariwisata identik dengan Muslim (tunduk pada kepatuhan dengan nilai-nilai Islam), meskipun dapat diperluas yang mencakup non Muslim.
- 3) Wisata religi (ziarah dan kunjungan ke tempat-tempat suci di seluruh dunia Islam).
- 4) Pariwisata Islam: suatu pariwisata dengan dimensi moral baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat diterima, berdimensi etis dan memiliki standar transcendental.
- 5) Wisata Islam: perjalanan yang bertujuan dengan motivasi “keselamatan” atau kegiatan yang berarti berasal dari motivasi Islam. Disamping itu, terminologi wisata juga dapat dibedakan dari konsepnya seperti wisata konvensional, wisata religi, dan wisata syariah/halal.

Pengembangan Wisata Halal

Konsep wisata syariah dalam pandangan Abdul-Sahib Al-Shakry harus memenuhi beberapa poin utama berikut: Pertama, kebangkitan budaya dan penyebaran nilai-nilai Islam. Wisata syariah harus menjadi ikon kebangkitan budaya Islam, sekaligus maklumat bagi dunia bahwa dunia Islam juga terdapat objek-objek wisata yang menggagumkan sekaligus bentuk warisan budaya. Dengan adanya wisata syariah ini, maka masyarakat dunia diperkenalkan terhadap keluhuran dan kebesaran budaya Islam. Kedua, bahwa wisata syariah harus mendatangkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat Muslim. Tentu saja ini adalah tujuan pragmatis yang tidak boleh dilupakan. Namun, didalam tujuan pragmatis semacam itu terdapat idealisme yang mulia, yaitu peduli terhadap peningkatan kesejahteraan umat Muslim, yang dalam konteks ini mereka menjadi host. Artinya, wisata syariah dikembangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim. Ketiga, menginginkan

supaya wisata syariah tersebut dapat menguatkan kepercayaan diri, identitas, dan keyakinan umat Muslim dalam menghadapi stereotip negatif dibanding kebudayaan dan gaya hidup budaya lain. Artinya berwisata bukan sekadar berbisnis, melainkan gaya hidup, standar prestise suatu kelompok masyarakat. Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri wisata di Indonesia seiring dengan tren wisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi Islam global. Dinamika pariwisata dunia dalam tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh peningkatan jumlah perjalanan antar negara dan pertumbuhan perekonomian terutama di kawasan Asia Pasifik. Total wisatawan dunia pada tahun 2014 mencapai 1.110 juta perjalanan luar negeri atau tumbuh 5% dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 lebih dari 300 juta (27,1% dari total wisatawan dunia) melakukan wisata ke Asia dan 96,7 juta di antaranya masuk ke Asia Tenggara. Sementara pada tahun 2015 ditengah situasi global yang tidak kondusif, perjalanan wisatawan dunia masih tumbuh 4,5%. Jadi, pariwisata tetap mengalami pertumbuhan signifikan.⁴⁰ Studi tentang wisata halal ini berupaya mengeksplorasi makna pariwisata budaya yang diintegrasikan dengan wisata halal sebagai pengalaman spiritual masyarakat modern. Artinya, meskipun wisata halal ini termasuk bentuk pariwisata kontemporer sebagai fenomena modern, maka pada masyarakat sekuler para wisatawan nampak berupaya memenuhi beberapa kebutuhan spiritual. Hal ini berbeda dengan masyarakat di Indonesia, praktik keagamaan bertujuan memenuhi kebutuhan spiritual, termasuk praktik ziarah di Cirebon sebagai bagian dari aspek pariwisata, hal ini menjadi tradisi keagamaan yang sudah berlangsung lama seiring dengan perkembangan sejarah masyarakat Indonesia. Namun, konteks ini akan berbeda jika dikaitkan dengan bidang pariwisata sebagai bagian dari industri atau kegiatan bisnis yang dapat memberikan keuntungan secara ekonomi dan diproyeksikan dalam kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada akhirnya, wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat, serta persyaratan lainnya.

Hasil Dan Pembahasan.

Provinsi Aceh yang sangat identik dengan Syariat Islam telah menjadi daya tarik kepada wisatawan asing dilihat dari data kunjungan turis. Namun, dugaan penulis, daya tarik tersebut lebih dominan bagi warga Melayu karena ditentukan oleh kesamaan rumpun budaya,

biaya hidup atau akomodasi yang lebih murah, dan cita rasa makanan yang lebih sesuai selera dibandingkan dengan dengan daya tarik branding halal sebagai alasan utama perjalan. Data dalam kurun waktu 2014-2015 misalnya menunjukkan bahwa kunjungan wisatawan dari Malaysia menempati jumlah terbesar dibandingkan dengan turis dari negara lain. Tentu bagi warga Malaysia, sangat banyak unsur kesamaan yang dapat mereka jumpai di Aceh dan salah satunya menurut pengakuan dari turis Malaysia adalah pesona alam di Aceh yang sangat natural yang menjadi daya tarik mereka. Mereka justru mencari suasana alamiah dan pedesaan yang mungkin bagi sebagian warga Malaysia yang sibuk bekerja dan/atau tinggal di kotakota besar merasa jenuh dengan suasana metropolitan (hasil wawancara dengan wisatawan Malaysia dalam periode Mei hingga Juli 2018) hasil kunjungan wisatawan ke Aceh dalam periode 2014-2015 sangat meningkat.. Melihat kepada definisi konseptual dan kondisi di lapangan di Aceh, terdapat sejumlah komponen yang menjadi isu krusial dalam mendiskusikan kembali gagasan wisata halal dan kesiapan Pemerintah Daerah serta para pemangku kepentingan lainnya di Aceh untuk dapat mewujudkan brand wisata halal dalam bentuk yang lebih

Hasil penelusuran penulis, Pemerintah Aceh belum menerbitkan Perda atau lebih familiar dengan sebutan Qanun di Aceh. Tanpa dasar hukum yang jelas dan tegas, maka sebuah gagasan akan sulit untuk diimplementasikan dengan maksimal. Padahal, keberadaan Qanun ini menjadi penting bagi pelaku usaha di sektor wisata sehingga mereka dapat mengacu kepada aturan yang jelas tentang konsep besar dan standarisasi wisata halal di Aceh.

Sejauh ini, Pemerintah Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Aceh telah berupaya secara rutin menyelenggarakan event yang menarik dengan berbagai tema. Beberapa event tersebut merupakan agenda unggulan yang dinilai sangat produktif dan inspiratif untuk menarik minat wisatawan berkunjung ke Aceh, diantaranya: Aceh Coffee Festival, Aceh Food Festival, Pemilihan Duta Wisata Aceh, Pacuan Kuda Tradisional di Aceh Tengah, dan lain-lain.

Wisata halal tentu saja membutuhkan sentuhan yang spesifik dibandingkan dengan wisata konvensional. Potensi yang sudah dimiliki Aceh apalagi ditambah dengan prestasi di atas kertas yang sudah diakui yaitu memenangkan 3 kategori; Aceh sebagai destinasi budaya ramah wisatawan muslim Terbaik, Bandara Sultan Iskandar Muda sebagai bandara ramah wisatawan muslim terbaik, Masjid Baiturrahman Sebagai Daya Tarik Wisata Terbaik dalam Kompetisi Pariwisata Halal Nasional 2016 oleh Kementerian Pariwisata RI.

Masyarakat dan Budaya menjadi salah satu faktor penentu dalam industri pariwisata. Masyarakat dan budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari branding wisata yang ingin dijual kepada pengunjung. Dalam hal ini, Bali menjadi rujukan terbaik bagaimana menyatunya masyarakat dan budayanya bahkan ritual agama sebagai bagian dari produk wisata yang memberikan nuansa yang sangat khas dan pengalaman yang tak terlupakan bagi wisatawan. Menjadikan budaya sebagai bagian penting dari wisata tidaklah mudah karena masyarakat dan budaya yang melekat padanya harus sejalan dengan tuntutan dari industri pariwisata misalnya, keramahan, kepastian informasi, kepastian harga, pelayanan yang memenuhi standar (standard of hospitality), dan sebagainya. Kondisi masyarakat di Aceh mirip dengan kondisi masyarakat di Bali yaitu masyarakat yang sangat kental dengan ritual keagamaan dan budaya. Bagi masyarakat yang mayoritas pemeluk Islam, agama, budaya dan kearifan lokal menjadi sesuatu yang tak dapat dipisahkan dari keseharian mereka Masyarakat. Bagi masyarakat Aceh yang mayoritas Islam, penerapan syariat Islam di Aceh dinilai merupakan sesuatu yang harus dipertentangkan, karena sesuai dengan nilai kehidupan yang selama ini telah dijalankan. Justru pemberlakuan Syariat Islam menjadi akan menjadikan Aceh semakin spesial karena mendapat legitimasi hukum terhadap nilai budaya dan norma budaya masyarakat Aceh. Artinya penerapan syariat Islam di Aceh tidak akan menghambat pengembangan pariwisata, tetapi dapat menjadi daya tarik tersendiri dan pembeda dari pariwisata di daerah maupun negara lain.

Peluang Dan Tantangan Wisata Halal (Halal Tourism)

Populasi muslim saat ini sekitar 30 persen dari total populasi dunia (Kim et al. 2015). Jumlah populasi muslim diperkirakan akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Peningkatan tersebut lebih tinggi dari populasi penganut agama lainnya. Diperkirakan populasi muslim antara tahun 2015 hingga 2060 meningkat sebesar 70 persen (Gambar 1), sedangkan populasi dunia meningkat sebesar 32 persen atau jumlah total populasi dunia pada tahun 2060 sebanyak 9.6 miliar orang. Hal ini juga menandakan bahwa wisatawan muslim akan terus meningkat. Pada tahun 2020, wisatawan muslim diperkirakan meningkat sebesar 30 persen dan meningkatkan nilai pengeluaran hingga 200 miliar USD (Master Card dan Crescent Rating, 2016). Adanya peningkatan wisatawan muslim merupakan peluang bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan wisata halal. Sehingga beberapa negara mulai mengambil peluang tersebut dengan mengembangkan wisata halal, baik negara dengan mayoritas muslim

maupun non-muslim seperti Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Thailand. Diharapkan tempat-tempat wisata, hotel, restoran, maskapai penerbangan, agen perjalanan serta semua yang terlibat dalam pariwisata dapat terlibat di wisata halal. Agen perjalanan memiliki peluang wisata halal dalam berbagai bidang.

Jumlah restoran halal dan hotel syariah masih terbatas, baik di negara dengan mayoritas muslim maupun non-muslim. Keterbatasan tersebut juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terkait halal. Oleh karena itu, pendidikan dan program pelatihan terkait halal diperlukan. Sehingga ini dapat menjadi peluang bagi universitas dan pusat pelatihan atau riset untuk menawarkan program tersebut. Selain itu, diperlukan standarisasi dalam wisata halal yakni berupa sertifikasi halal di restoran hotel dan lainnya. Indonesia sendiri banyak tempat-tempat yang berbasis syariah salah satu daerahnya adalah Aceh.

Tantangan dalam mengembangkan wisata halal salah satunya terkait dengan pemasaran, karena pemasaran wisata halal bukan suatu yang mudah. Hal ini dikarenakan perbedaan antara tuntutan wisatawan non-muslim dan wisatawan muslim. Wisatawan non-muslim dapat memutuskan untuk tidak melakukan perjalanan ke objek wisata tanpa adanya atribut tertentu. Sehingga salah satu tantangan wisata halal adalah bagaimana melayani wisatawan nonmuslim dan memenuhi kebutuhan mereka tanpa berbenturan dengan konsep wisata halal. Misalnya, beberapa hotel menyatakan bahwa mereka adalah hotel syariah di dalam promosinya dan ini mungkin tidak menarik bagi wisatawan non-muslim. Oleh karena itu, wisata halal dapat menjadi kendala dalam sektor industri pariwisata. Namun juga dapat menjadi peluang bisnis untuk menggunakan kreativitas dan fleksibilitas dalam melayani berbagai kebutuhan wisatawan muslim dan non-muslim. Hal ini juga dapat menjadi kajian atau riset untuk memecahkan masalah tersebut.

Prospek Wisata Halal

Paket wisata halal bisnis baru sekaligus jawaban baru sekaligus jawaban bagi para Muslim agar tetap bersenang-senang tanpa melangkahi syariah. Wisata halal melengkapi ladang uang syariah yang sudah duluan mengakar di masyarakat Indonesia dan dunia, yaitu industri keuangan syariah dan makanan halal. Konsumennya bukan Cuma orang Islam, tapi juga non-Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal seperti yang selalu dianjurkan

Oraganisasi Pariwisata Dunia (WTO) semua komponennya dibingkai dengan nilai-nilai Islam.²⁸ Memang banyak restoran yang menyediakan makanan halal dan hotel yang menempatkan arah kiblat disetiap kamar, namun mereka belum benar-benar mengaplikasikan syariat Islam. Tak heran bila masih banyak pengelola hotel atau penyedia jasa wisata lainnya belum memahami konsep itu dan merasa belum siap untuk menerapkannya. Dalam pemikiran mereka , terminologi wisata masih selalu identik dengan hiburan malam.²⁹ Namun, ketika sebuah hotel menyediakan mushala dengan kamar-kamar yang menyediakan kitab suci, dapur yang halal, dan tidak menyediakan minuman keras, maka hotel itu telah menerapkan prinsip syariah. ³⁰ Wisata syariah memiliki potensi yang sangat besar. Apalagi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Penganut Islam di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk. Wisata syariah ini juga diharapkan juga dapat menarik Muslim dari negara lain.³¹ Saat ini populasi umat Islam dunia berjumlah lebih dari 1,8 miliar jiwa atau sekitar 28 persen dari total penduduk dunia, yaitu 6,4 miliar dan tersebar 148 negara. Setiap tahun diperkirakan pertumbuhan jumlah penduduk Muslim mencapai 1,8 persen atau 60 persen diatas tingkat pertumbuhan penduduk nonMuslim yang hanya 1,12 persen.³² Sebanyak 50 persen dari penduduk Muslim dunia berusia kurang dari 25 tahun yang berarti mereka berada pada usia produktif dan potensial berpegian sebagai wisatawan. Mereka tersebar di Asia Tenggara 897 orang, Timur Tengah sebanyak 190 juta orang, Afrika 443 juta orang, Eropa 51 juta orang, Amerika 7 juta orang, dan Amerika Selatan 3 juta orang.³³ Selain itu, beberapa studi diketahui, adanya labelisasi halal justru meningkatkan pendapatan sebuah perusahaan. Survei independen yang dilakukan LPPOM MUI menunjukkan, permintaan masyarakat atas produk halal mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.³⁴ Di indonesia setidaknya ada sembilan lokasi wisata yang mempunyai potensi untuk dipromosikan sebagai destinasi wisata syariah. Sejumlah daerah tersebut adalah Sumatra Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Bali tidak termasuk dalam sembilan tujuan destinasi wisata syariah di Indonesia. Begitu juga dengan aceh yang secara resmi telah menggunakan syariat islam.

Tantangan Terhadap Penerapan Wisata di Aceh

Kondisi Aceh memiliki kelebihan dan juga kelemahan dalam mendukung pariwisata, beberapa isu yang berpotensi terhadap lemahnya sektor pariwisata di Aceh antara lain: Faktor geografis (bukan jalur transit), factor demografis (fanatik pada syariat islam), faktor infrastruktur, faktor komitmen investasi pemerintah dan swasta.

Faktor geografis (bukan jalur transit). Aceh terletak di ujung barat Indonesia dan bukan merupakan jalur transit untuk keberbagai destinasi lainnya. Akibatnya, wisatawan yang ingin mengunjungi Aceh memang harus mengagendakan secara khusus rencana perjalanannya dan hal itu tentu akan berdampak pada biaya perjalanan yang harus dibudgetkan secara khusus. Berbeda dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang merupakan jalur transit, sehingga kegiatan berwisata dapat dilakukan secara simultan, sehingga ada beberapa komponen biaya yang dapat diefisienkan.

Faktor demografis (fanatik pada syariat Islam). Masyarakat Aceh tergolong fanatik terhadap ke-Islaman-nya dan hal tersebut seringkali menimbulkan rasa ketidaknyaman bagi sebagian wisatawan yang belum melihat langsung Aceh dari dekat dan merasakan sendiri pengalaman berinteraksi dengan masyarakat Aceh dimana kondisi kekhawatiran tersebut dapat sirna sama sekali. Dalam hal ini, ada sebuah pekerjaan rumah yang penting bagi Pemerintah Aceh yang secara konsisten dan berkelanjutan untuk menampilkan nuansa syariat Islam yang penuh dengan kedamaian. Mediamedia nasional dan internasional turut andil dalam menimbulkan citra negatif tentang pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimana cenderung sangat proaktif memberitakan sisi hukuman bagi pelanggar syariat Islam. Padahal hukum tersebut adalah konsekuensi logis dari aturan hukum yang diakui oleh negara. Namun disisi lain juga tantangan bagi pemerintah Aceh agar dapat menarik perhatian media dengan sisi lain dari syariat Islam sehingga dapat berkontribusi positif bagi wisata halal bukan justru menjadi kotra produktif.

Faktor infrastruktur. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa infrastruktur pariwisata dan sarana pendukung pariwisata masih tergolong belum memadai di Aceh. Saranasarana yang ramah muslim seharusnya tersedia dalam jumlah yang cukup dan dalam kondisi yang layak. Namun kondisi di lapangan masih banyak kita jumpai misalnya di tempat umum seperti warung kopi, masjid, pasar, dan lainnya, belum tersedia sarana ramah muslim/muslih seperti, toilet yang belum representatif bagi perempuan maupun kaum defabel, mushalla kafe yang tersedia sangat sempit, pedisterian yang kurang ramah bagi pejalan kaki.

Faktor komitmen investasi pemerintah dan swasta. Investasi untuk sektor pariwisata seperti menjadi topik yang tidak begitu optimis di Aceh. Beberapa destinasi wisata lokal

umumnya lahir dari inisiatif dan modal investasi swasta skala kecil atau menengah. Namun belum ada investasi dari pemerintah dan swasta untuk investasi wisata dalam skala besar kecuali fasilitas hotel. Sementara untuk sarana transportasi seperti angkutan umum, masih didominasi oleh modal peorangan, seperti becak, ojek, angkot, dan lain-lain. Lebih tragisnya masih ada pandangan dari para elit sekalipun bahwa pariwisata bukanlah sektor yang menjanjikan secara ekonomi apalagi terkait dengan wisata halal yang dinilai bukan sebagai pasar yang besar sehingga upaya untuk meningkatkan wisata halal menjadi tidak maksimal sebagaimana diungkapkan oleh Riyanto Sofyan, Ketua Tim Percepatan Wisata Halal Kemenpar RI.

Kendala Wisata Halal Dengan jumlah penduduk yang mayoritas muslim serta kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Selain itu kunjungan wisatawan dari berbagai negara pun mencapai kurang lebih nya 1,27 juta orang, seharusnya membuat pariwisata syariah ini mampu untuk berkembang pesat di negara ini. Bahkan bisa melebihi negara negara lain di dunia.³⁶ Jumlah agen perjalanan yang menawarkan wisata syariah di Indonesia lebih minim lagi sa. Salah satubiro perjalanan yang menyediakan paket semacam itu bagi turis Muslim adalah Bali Muslim Tour. ³⁷ Masih minimnya pelaku di bisnis ini, membuat Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada 2013 bertekad untuk merealisasikan gagasan wisata syariah.

Kesimpulan

Wisata halal (halal tourism) merupakan studi yang mulai berkembang beberapa tahun terakhir. Penggunaan terminologi terkait wisata halal juga beragam dan hingga kini masih menjadi perdebatan. Begitu juga dengan prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal yang belum disepakati. Namun, tersedianya makanan yang halal, produk yang tidak mengandung babi, minuman yang tidak memabukkan (mengandung alkohol), ketersediaan fasilitas ruang ibadah termasuk tempat wudhu, tersedianya Al-Qur'an dan peralatan ibadah (shalat) di kamar, petunjuk kiblat dan pakaian staf yang sopan merupakan syarat yang mampu menciptakan suasana yang ramah muslim. Adanya peningkatan wisatawan muslim dari tahun ke tahun merupakan peluang dan tantangan bagi sektor pariwisata untuk mengembangkan wisata halal. Banyak negara-negara (baik mayoritas muslim maupun non-muslim) berupaya mengembangkan wisata halal. Namun, dilihat dari konsep dan prinsip wisata halal yang ada, negara-negara tersebut umumnya hanya mencoba menciptakan suasana yang ramah muslim. Pengembangan wisata halal perlu untuk dilakukan, salah

satunya dengan melakukan berbagai penelitian atau kajian. Hingga kini, penelitian terkait wisata halal masih terbatas, terutama di Indonesia. Salah satu penelitian yang mungkin dapat dilakukan yakni terkait persepsi wisatawan non-muslim terhadap wisata halal.

Tulisan ini bukan bermaksud mendiskreditkan Pemerintah Aceh dalam hal implementasi wisata halal di Aceh, tetapi justru mendukung dan mendorong Pemerintah Aceh untuk lebih serius lagi mengelola wisata halal dengan memperhatikan beberapa isu krusial sebagai bahan kajian lebih lanjut agar gagasan wisata halal dapat berjalan maksimal di Aceh dan dapat dikonversikan menjadi ekonomi yang bergerak dinamis dan mampu membangkitkan ekonomi rakyat. Aceh telah memiliki modal untuk pengembangan lebih lanjut konsep wisata halal berupa potensi wisata, nuansa Syariat Islam dan beberapa prestasi dalam kategori wisata halal berkaliber nasional dan internasional. Namun demikian beberapa elemen penting sebagai rekomendasi untuk diperhatikan kembali untuk kesuksesan implementasi wisata halal antara lain ketersediaan payung hukum berupa penerbitan Qanun wisata halal, Penerbitan grand design wisata halal Aceh, inisiasi dan peran badan khusus semisal Aceh Halal Tourism Board, keberpihakan anggaran dan dukungan legislatif, road map dan grand design pariwisata halal, infrastruktur yang dapat diandalkan, sertifikasi dan standarisasi produk wisata halal, program pembekalan kapasitas SDM wisata halal yang terukur, dukungan masyarakat dan budaya, kesesuaian antara brand promise dan brand experience, dan program marketing brand wisata halal secara menyeluruh (integrated). Harapannya Pemerintah Aceh dapat bekerja lebih maksimal untuk mewujudkan Aceh sebagai destinasi wisata halal yang dapat menjadi model bagi provinsi lainnya.

Daftar Pustaka

- Hery Sucipto dan F Andayani, Wisata Syariah (Jakarta Selatan: Grafindo Books Media dan Wisata Syariah Consulting, 2014)
- Suci, F. (2018). Model Komunikasi Dalam Pengelolaan Wisata Halal di Aceh Besat dan Banda Aceh. UIN Raniry, Banda Aceh.
- Cheria-travel.com. (2017, April). Wisata Halal Terbaik Aceh. Cheria-Travel. Com. Retrieved from <https://www.cheria-travel.com/2017/04/wisata-halalterbaik-aceh.html>
- I Gde Pitana, I Ketut S D, Pengantar Ilmu Pariwisata, (Yogyakarta: Andi, 2009)
- Cnnindonesia.com. (2017, April). Aceh akan Perbanyak Fasilitas Wisata Halal. Cnnindonesia.Com.Retrievedfrom<https://www.cnnindonesia.com/gayahidup/2017040514052-307-205126/aceh-akan-perbanyak-fasilitas-wisatahalal>

- Aan J, Industri Wisata Halal di Indonesia: Potensi dan Prospek, Jurnal (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon)
- Kurniawan Gilang Widagdyo, “Analisis Pasar Pariwisata Halal Indonesia”, jurnal, (Universitas Sahid Jakarta, Jakarta) 2015.
- Rasyid, A. (2017). Peluang dan Tantangan Wisata Halal di Indonesia. Retrieved Desember 5, 2019, from [http:// business-law.binus.ac.id/2017/11/18/ peluang-dan-tantangan-wisatahalaldi-indonesia](http://business-law.binus.ac.id/2017/11/18/peluang-dan-tantangan-wisatahalaldi-indonesia).
- Widagdyo, KG. 2015. Analisis Pasar Pariwisata Halal di Indonesia. The Journal of Tauhidinomics. 1(1): 73-80.
- Prodjo, Adityo, W. (2016). Aceh Tawarkan Sejumlah Destinasi Wisata Halal. Travel.Kompas.Com.Retrievedfrom<https://travel.kompas.com/read/2019/12/06/153900327/Aceh.Tawarkan.Sejumlah.Destinasi.Wisata.Halal>